

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang sedang giat dalam melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Pelaksanaan pembangunan tidaklah mudah dengan sumber daya yang sangat beragam salah satunya dilihat dari kondisi geografis yang dimiliki. Upaya dalam mengatasi persoalan pembangunan harus terus dilakukan. Pemerintahan Republik Indonesia ekstra keras untuk mewujudkan hal tersebut. Indonesia tidak lagi menerapkan sistem sentralisasi sebagai sistem pemerintahan, melainkan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurus sendiri rumah tangganya.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penunjang keberhasilan pembangunan daerah diberlakukanlah otonomi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan implikasi atas adanya tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pemerintahan, salah satunya pada bidang ekonomi dengan menggali potensi yang dimiliki oleh daerah melalui pertumbuhan ekonomi dalam mencari sumber pendanaan pembangunan. Kebijakan daerah dapat menentukan pembangunan ekonomi disuatu daerah dengan menentukan pertumbuhan ekonomi yang memiliki prioritas di daerahnya (Zahari, 2015).

Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai gambaran atas kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu hal yang umum dipakai dalam mengukur suatu perkembangan perekonomian

disuatu negara atau daerah dalam hal untuk peningkatan barang dan jasa pada kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat (Sirait, 2014).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah proses yang berkelanjutan menuju kondisi yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Proses peningkatan kapasitas pendapatan daerah juga dapat disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Pada kondisi terjadi peningkatan dari satu periode ke periode berikutnya dapat diartikan bahwa perekonomian mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan oleh semakin besarnya jumlah barang dan jasa yang diperoleh (Wikardoyo, 2019). Tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK). Perbandingan nilai PDRB ADHK pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya merupakan angka laju pertumbuhan ekonomi tahun berjalan (Hasanur dan Zainal, 2017).

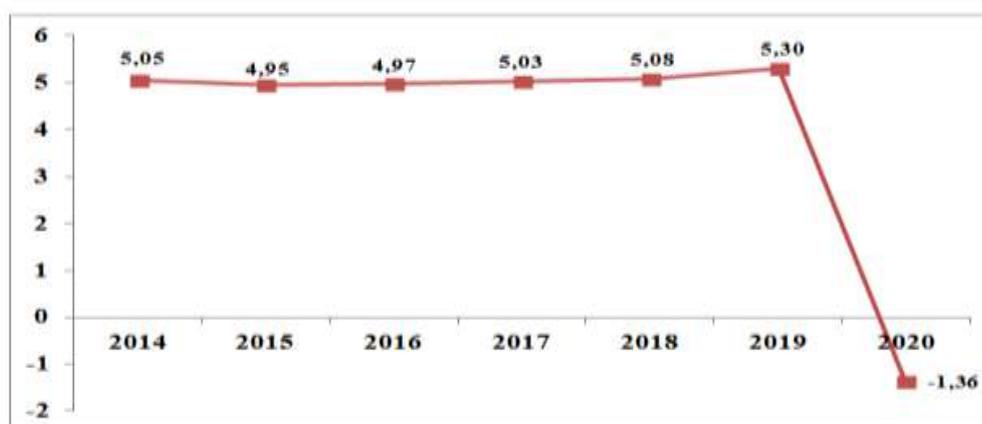
Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pertumbuhan daerah agar mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Untuk perwujudan kesejahteraan dalam melayani masyarakat, daerah harus memiliki sumber keuangan atau pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah dibagi menjadi tiga yaitu : pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Kemandirian daerah dalam memperoleh dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dilakukan agar mampu memberikan pemasukan kepada daerahnya untuk dikelola dengan baik merupakan wujud nyata dari PAD. Pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. PAD memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sebagai optimalisasi PAD diharapkan dapat menjadi penyangga, dimana daerah yang mandiri secara keuangan dapat dilihat dari tingkat kualitas otonomi daerah berdasarkan jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh PAD dalam memenuhi kebutuhan daerah. PAD bersumber dari empat jenis yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat memiliki peluang mendapatkan kenaikan PAD. Pendapatan asli daerah harus lebih menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, dengan melakukan terobosan dalam menemukan dan menggali sumber-sumber pendanaan yang bersumber dari PAD (Zahari, 2015).

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bondowoso merupakan daerah yang saat ini mulai berkembang dengan baik mulai mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan dalam upayanya untuk meningkatkan PAD dilakukan dengan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah adalah salah satu pelaksana ekonomi yang mempunyai peran penting dengan kekuatan dan kemampuannya mengontrol dan mengendalikan sendiri perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2014-2020 seperti grafik berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Bondowoso, 2021

Gambar 1.1 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bondowoso, 2014-2020 (persen)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2014-2020. Nilai PDRB Kabupaten Bondowoso mulai tahun 2014-2020 mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2020 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurun secara drastis. Penurunan tersebut diakibatkan oleh penurunan yang terjadi pada produksi di sembilan lapangan usaha. Nilai PDRB ADHK 2010 mencapai 13.451,77 milyar rupiah yang terjadi di tahun 2020, namun nilai tersebut memiliki selisih penurunan yang cukup besar dari 13.637,36 milyar rupiah yang terjadi di tahun 2019. Akibatnya terjadi kontraksi sebesar -1,36 persen pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya di tahun 2019 yang sebesar 5,30 persen. Akibat pandemi covid-19 yang terjadi selama 2020 berimbas pada penurunan produksi.

Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso tahun 2021 tercatat sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi minus atau terkontraksi di tahun 2020 dengan besaran yang bervariasi. Jenis lapangan usaha makan minum dan penyediaan akomodasi terkontraksi paling dalam sebanyak 18,18 persen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat penginapan dan restoran serta rumah makan yang sempat tutup, meskipun ada yang buka tetapi hanya bisa melayani *take away*. Beberapa jenis lapangan usaha yang mengalami kontraksi antara lain, jenis lapangan usaha jasa lainnya mengalami kontraksi sebanyak 4,02 persen, jenis lapangan usaha perdagangan eceran dan besar, serta reparasi sepeda motor dan mobil dengan kontraksi sebanyak -8,23 persen, dan jenis lapangan usaha jasa perusahaan yang terkontraksi sebanyak 7,26 persen. Lima lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi antara 0,47 persen hingga 6,24 persen.

Perhatian pemerintah teralih terhadap masalah kesehatan yaitu adanya pandemi covid-19 serta aturan turunannya seperti protokol kesehatan social distancing, PSBB menyebabkan sektor ekonomi tidak terjaga dengan baik, walaupun telah diluncur kan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) bagi masyarakat yang terdampak covid-19 (Berita resmi statistik, Badan pusat statistik Bondowoso tahun 2021).

Penerimaan Daerah di Kabupaten Bondowoso juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya khususnya dari penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2014 – 2020 seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Realisasi penerimaan dan kenaikan/penurunan PAD tahun 2014-2020

| No | Tahun | Realisasi PAD | Kenaikan / Penurunan PAD |
|----|-------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2014 | Rp 134.584.701.401,68 | Rp 55.024.978.517,55 |
| 2 | 2015 | Rp 158.974.210.144,00 | Rp 24.389.508.742,32 |
| 3 | 2016 | Rp 177.025.949.242,13 | Rp 18.051.739.098,13 |
| 4 | 2017 | Rp 229.151.109.430,64 | Rp 52.125.160.188,51 |
| 5 | 2018 | Rp 203.239.207.718,18 | Rp (25.911.901.712,46) |
| 6 | 2019 | Rp 218.547.817.740,15 | Rp 15.308.610.021,97 |
| 7 | 2020 | Rp 222.649.322.623,72 | Rp 4.101.504.883,57 |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso (2021)

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan penerimaan PAD Kabupaten Bondowoso dari tahun 2014 yang sebesar Rp.134.584.701.401,68 menjadi Rp.222.649.322.623,72 di tahun 2020, juga dapat dilihat kenaikan/penurunan PAD Kabupaten Bondowoso dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 55.024.978.517,55 menjadi Rp.4.101.504.883,57 pada tahun 2020. Namun, terlihat juga bahwa nilai realisasi penerimaan PAD tertinggi sesungguhnya terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp. 229.151.109.430,64 dan kenaikan PAD yang tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 55.024.978.517,55. Ini berarti bahwa penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso masih bisa ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi.

Besar kecilnya penghasilan yang didapatkan seseorang akan mempengaruhi kemampuannya dalam membayar berbagai kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dapat diibaratkan apabila semakin tinggi tingkat PDRB yang didapatkan maka mengakibatkan semakin tinggi juga potensi penerimaan daerah. PDRB dalam pertumbuhan ekonomi adalah cermin dari besar kecilnya PAD (Hasanur dan Zainal, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PAD (Y) di Kabupaten Merangin. Periode penelitian yang digunakan kurun waktu 2003 – 2012. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengakibatkan PAD yang tinggi juga pada wilayah

tersebut. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Dandy (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau. Periode penelitian yang digunakan kurun waktu 2009 – 2017.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan alasan belum ada penelitian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap PAD di Kabupaten Bondowoso Berdasarkan fenomena yang dijabarkan diatas, maka judul penelitian yang diambil yaitu **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang dibuat adalah “Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bondowoso ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bondowoso.”

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Bondowoso.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan bahan masukan dalam rangka meningkatkan PAD yang berguna untuk membiayai

pembangunan daerah melalui pertumbuhan ekonomi pada saat mengambil keputusan atau kebijakan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat mempermudah dalam memperoleh materi penelitian yang sejenis sehingga dapat dijadikan sebagai referensi tambahan.